

SERAKAN KAYU GELONDONGAN, BUKTI PIDANA LINGKUNGAN

Sudah 836 Jiwa Melayang, 3 Menteri Didesak Mengundurkan Diri

Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera sudah sepekan lebih melanda. Satu per satu fakta pun mencuat ke permukaan, terutama soal pembalakan liar. Tumpukan gelondongan kayu dari hulu sungai yang terbawa saat banjir dahsyat menghantam Aceh, Sumatera Utara (Sumut) maupun di Sumatera Barat (Sumbar) bak menjadi bukti dari 'langit'. Unsur pidana mulai dianalisa. Pakar menggarisbawahi, itu baru bisa diterapkan apabila ada pembuktian hubungan sebab-akibat yang jelas antara aktivitas manusia--seperti illegal logging-- dengan terjadinya banjir bandang. Lebih jauh, desakan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta maaf kepada publik dan mundur dari jabatannya menguat. Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan update terbaru bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (4/12/2025). Total korban meninggal 836 jiwa dan 518 masih hilang. Terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengindikasikan terdapat 12-20 perusahaan yang berkontribusi besar pada bencana tersebut dan bakal dicabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Diketahui, perusahaan-perusahaan itu mengelola lahan seluas 750.000 hektare. Sementara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengaku telah 'turun gunung'. Penyelidikan dilakukan berfokus pada banyaknya material kayu gelondongan yang ditemukan terbawa arus saat terjadi banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Meski belum resmi masuk ranah hukum, kini banjir di Sumatera bukan sekadar bencana alam, tapi juga kriminalitas lingkungan yang sedang diadili oleh publik.

[BACA HAL 11...](#)

Menteri Kehutanan RAJA JULI ANTONI

Kesalahan : Izin hutan terlalu longgar, pengawasan lemah, tanpa moratorium, penindakan minim.

Akibat: Hutan hilang, banjir-longsor membesar, kayu gelondongan jadi bukti eksploitasi tak terkendali.

Menteri ESDM BAHLIL LAHADALIA

Kesalahan : Izin tambang masif, pengendalian minim, reklamasi longgar, konflik kewenangan.

Akibat: Lahan rawan longsor, sungai tersedimentasi, daya dukung alam runtuh.

Menteri Lingkungan Hidup HANIF FAISOL NUROFIQ

Kesalahan : AMDAL mudah lolos, audit lemah, respon lambat, mitigasi tak terintegrasi.

Akibat: Proyek berisiko tetap jalan, kerusakan terakumulasi dan memicu bencana besar.

**KESALAHAN 3 MENTERI
DALAM BENCANA SUMATERA**

Deretan Kasus Pembalakan Liar

Sepanjang 2025 (Modus PHAT)

1. Aceh Tengah - Juni 2025

- **Modus:** Penebangan di luar areal PHAT & kawasan hutan.
- **Pelaku:** Pemilik PHAT.
- **Bukti:** 86,60 m³ kayu ilegal.
- **Temuan:** Pencucian kayu lewat dokumen PHAT.

2. Solok, Sumatera Barat - Agustus 2025

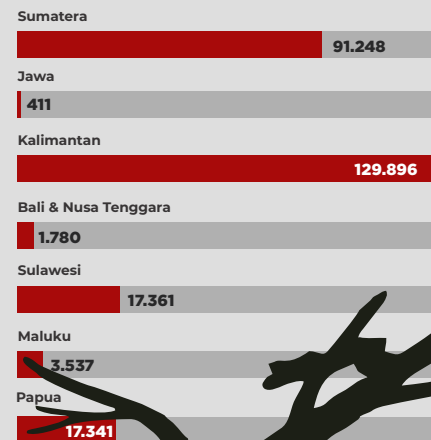
- **Modus:** Kayu dari kawasan hutan diangkut memakai dokumen PHAT.
- **Bukti:**
 - 152 batang kayu per log,
 - 2 ekskavator,
 - 1 bulldozer.
- **Pola:** Penebangan di luar izin, legalisasi lewat dokumen PHAT.

3. Sipirok, Tapanuli Selatan - 2025

- **Modus:** Pengangkutan kayu memakai dokumen PHAT yang sudah dibekukan.
- **Bukti:**
 - 4 truk,
 - 44,25 m³ kayu bulat.
- **Temuan:** Dugaan penyalahgunaan izin yang sudah tidak berlaku.

Jumlah Lahan Terdeforestasi

(2024) (Dalam Hektar)



PROSES DIPANGKAS, PENGAJUAN BANSOS CUKUP 3 TAHAP

Proses digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) tak hanya memindahkan proses dari manual ke sistem elektronik, namun memangkas proses pengajuan bantuan sosial (bansos) dari 7 tahap menjadi 3 tahap. Selain itu juga memastikan bansos tersebut diterima oleh yang berhak.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan digitalisasi perlinsos ini terbukti dari hasil piloting yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. =

"Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor," kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Menurut Rini hal terpenting dalam proses digitalisasi perlinsos ini dimulai dari menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.

Perlinsos harus berbasis data pemerintah yang saling terhubung



(Ilustrasi) Petugas memotret warga memperlihatkan uang tunai saat penyaluran bantuan sosial di Kota Tangerang, Banten. (dok. ant)

sehingga subsidi itu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Belum lagi hal ini juga sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar perlinsos harus tepat sasaran dan berbasis data, sehingga bantuan betul-betul diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Bahkan menurut Rini, Prabowo juga mendorong keberanian pemerintah untuk meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi bila perlu. Untuk itu DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain sehingga bisa menjadi lebih bersih, akurat, dan

update.

"Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan," tegas Rini.

Sementara itu, Ketua Komite PTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pilot project digitalisasi perlinsos ini akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota berdasarkan hasil seleksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di mana menurutnya sejauh ini daerah yang sudah diusulkan menjadi pilot project terdiri dari 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, serta 5 daerah di Indonesia timur.

"Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri," ungkap Luhut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, digitalisasi bantuan sosial merupakan agenda strategis pemerintah guna memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu memperoleh haknya secara tepat. Karenanya, diperlukan percepatan digitalisasi bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran, efektif, dan efisien.

"Kita ketahui bahwa masalah sosial, bantuan sosial, satu merupakan tugas negara, juga konstitusi kita mengatur untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu, orang terlanter, dan lain-lain," ujarnya pada acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Nasional yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Karena itu, lanjut Mendagri, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempercepat digitalisasi bantuan sosial. Salah satu momentum pentingnya adalah peluncuran pilot project digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Program yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri tersebut dinilai berhasil.

Mendagri menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan sosial sebagai salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas kepala daerah. Selama ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial. (wid, rls, ant/dya)

Realisasi bansos hingga Oktober 2025 mencapai Rp147,2 triliun (98,6% dari target)

- **KARTU SEMBAKO:**
Rp54,1 triliun untuk 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
- **PBI JKN:**
Rp38,6 triliun untuk 96,8 juta peserta.
- **PKH:**
Rp27,5 triliun untuk 10 juta KPM.
- **KIP KULIAH:**
Rp15 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa.
- **PIP:**
Rp8,5 triliun untuk 11,5 juta siswa.

Orang Kaya Nikmati Subsidi, Purbaya Siapkan Redesign

tertutup.

"Tadi di dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu, jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam hal desainnya juga ada," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Purbaya menyatakan pihaknya menemukan kelompok orang-orang yang tergolong super kaya masih menerima subsidi pemerintah. Ia menegaskan, dalam dua tahun ke depan, pemerintah akan merancang ulang penyaluran subsidi.

"Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya," katanya.

Bendahara negara itu menambahkan, masyarakat berpenghasilan tinggi, khususnya kategori desil 8, 9, dan 10, akan

mengalami pengurangan subsidi secara signifikan.

"Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu design macem-macam karena melibatkan juga BUMN dan Danantara," jelas dia.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, bersama Kemenkeu telah membahas sejumlah solusi agar proses penyaluran subsidi dan kompensasi berjalan secara efisien tanpa mengurangi hak masyarakat.

"Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien," kata Rosan.

Rosan menegaskan bahwa penyempurnaan ini diharapkan membuat anggaran subsidi dan kompensasi lebih efisien, namun tetap memastikan hak masyarakat tidak berkurang. (wid, ist, ant/dya)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, kemarin. Salah satu isi pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah rencana Amandemen UUD 1945 yang menjadi opsi penetapan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Meski demikian, Politikus Partai Gerindra tersebut membantah telah ada kesepakatan antara presiden dan MPR soal rencana Amandemen tersebut. Dia mengklaim, pembahasan PPHN hanya singkat dan bersifat awalan.

"Baru awalan saja," kata Muzani dikutip, Kamis (4/12/2025).

Menurut dia, Prabowo pun memberikan pesan kepada Muzani soal rencana pembahasan soal PPHN di MPR. Dia mengklaim, presiden ingin seluruh pembahasan tentang rencana tersebut dilakukan secara perlahan.

"Ya, diminta tidak buru-buru," ujar Muzani.

November lalu, Muzani memastikan rencana lembaganya mendorong penetapan PPHN masih terus berjalan. Menurut dia, MPR tinggal bertemu dengan Prabowo untuk membahas tentang opsi dasar hukum pembentukan PPHN. Menurut dia, rencananya MPR akan menyerahkan draf final rencana pembentukan PPHN. Dalam pertemuan, MPR akan meminta pertimbangan Prabowo soal dasar hukum terbaik untuk melindungi PPHN tersebut.

Selain amandemen UUD 1945, dua opsi dasar hukum lainnya adalah pemerintah dan DPR bisa merancang sebuah UU khusus tentang PPHN seperti beberapa beleid tentang kebijakan pemerintah. Atau terakhir, PPHN bisa sekadar konsensus nasional yang bisa menjadi acuan pembangunan jangka panjang.

Jangan Wacana Elit Semata

Terpisah, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, mengungkap hasil kajian terkait wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Komisi Kajian Ketatanegaraan mengingatkan agar wacana amandemen ini jangan hanya menjadi agenda elit saja, tetapi perlu mendengarkan aspirasi masyarakat.

Wacana amandemen kelima itu sebelumnya merupakan masukan dari MPR periode 2019–2024.

"Ya, tentu kita berharap ketika wacana perubahan Undang-Undang Dasar ini bergulir, maka wacana ini jangan sampai hanya menjadi wacana elit saja. Wacana perubahan Undang-Undang Dasar itu benar-benar harus aspiratif, harus dari bawah ke atas," ujar Taufik usai rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Maka, amandemen konstitusi harus berdasarkan kebutuhan

Bahas Amandemen UUD 1945 dengan Prabowo

KETUA MPR: DIMINTA TAK BURU-BURU

Wacana UUD 45 bakal diamandemen mencuat lagi setelah Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku dirinya sempat menyinggung wacana amendemen UUD 1945 ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Dalam pertemuan itu diungkapkan presiden ingin seluruh pembahasan tentang rencana tersebut dilakukan secara perlahan.



masyarakat, bukan kebutuhan para elit. Karena itu, Komisi Kajian Ketatanegaraan mendorong pelibatan masyarakat.

"Sehingga ketika memang dianggap ada kebutuhan untuk melakukan kembali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45, maka perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, bukan kebutuhan elit. Oleh karena

itu, pelibatan masyarakat untuk menjadikan wacana ini sebagai wacana yang hidup dalam perbincangan sehari-hari menjadi penting dan harus didahului," ujar Taufik.

"Jadi, jangan sampai keputusan perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang kelima ini hanya terbatas diputuskan oleh MPR. Tapi harus benar-benar mendengarkan apakah

masyarakat menginginkan perubahan ini, perubahan seperti apa, dan dasar evaluasinya seperti apa," tegasnya.

Dengan mendengarkan suara masyarakat, dapat terlihat apakah memang dibutuhkan amandemen kelima atau tidak. (wid,ant,ist/dya)

Perubahan utama yang diusulkan dalam RUU PPSK 2025

1) Amandemen Pertama - 19 Oktober 1999

Fokus: Kedaulatan rakyat, penguatan DPR, pembatasan kekuasaan presiden.

Perubahan Utama: Masa jabatan presiden dibatasi dua periode; DPR lebih kuat dalam legislasi; revisi pasal-pasal terkait eksekutif-legislatif.

2) Amandemen Kedua - 18 Agustus 2000

Fokus: Demokratisasi struktur negara, penegasan HAM, penguatan NKRI dan daerah.

Perubahan Utama: Penambahan Bab HAM; aturan otonomi daerah dan simbol negara; revisi bab tentang pemerintahan daerah.

3) Amandemen Ketiga - 9 November 2001

Fokus: Sistem ketatanegaraan lebih demokratis, pemisahan kekuasaan, pengawasan lebih kuat.

Perubahan Utama: Pemilihan presiden langsung; pembentukan MK; penguatan DPD dan aturan pemilu.

4) Amandemen Keempat - 10 Agustus 2002

Fokus: Penyempurnaan struktur negara dan hubungan antar lembaga.

Perubahan Utama: MPR tak lagi lembaga tertinggi; aturan detail soal pendidikan, ekonomi, keuangan, bank sentral, pertahanan, dan mekanisme perubahan UUD.

Ramai Lagi Usai Disinggung Prof Jimly

WACANA amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mencuat setelah Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof Jimly Asshiddiqie, mendorong pentingnya perubahan kelima UUD 1945. Sejumlah partai politik menyampaikan tanggapan atas usulan tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira menilai, wacana amandemen bukan isu baru. Ia menjelaskan bahwa pembahasan perubahan konstitusi telah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya melalui Badan Pengkajian MPR, termasuk terkait gagasan pengembalian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Amandemen terbatas menjadi keharusan agar PPHN dapat ditetapkan kembali sebagai pedoman pembangunan nasional. Diskusi ini sempat terhenti ketika muncul wacana perubahan konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan presiden," kata Andreas.

Ia menambahkan, Badan Pengkajian MPR saat ini tengah

melakukan kajian komprehensif terkait UUD 1945 dan berencana mengundang Jimly untuk memaparkan pandangannya. "Pemikiran Prof Jimly sejalan dengan kajian yang sedang berlangsung. Adapun lembaga yang berwenang melakukan amandemen tetap MPR," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai amandemen kelima UUD 1945 belum menjadi kebutuhan mendesak. Menurut dia, perubahan konstitusi memerlukan persetujuan seluruh fraksi di DPR serta dukungan publik yang kuat.

"Ada 10 isu strategis yang diusulkan dan perlu dikritisi. Namun menurut saya, yang lebih mendesak adalah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik," kata Irma.

Irma menilai persoalan citra dan kinerja DPR berkaitan dengan tata kelola internal partai politik, termasuk relasi struktural yang membuat anggota dewan rentan terhadap tekanan politik. "Anggota

DPR sering tak bisa mengkritisi pemerintah secara maksimal karena posisi mereka sebagai perpanjangan tangan partai, dengan risiko dipindahkan komisi atau di-PAW," ujarnya.

Ia juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyatuan jadwal pemilu pusat dan daerah yang dinilai berpotensi menambah masa jabatan DPRD tanpa landasan hukum yang jelas. Irma menilai pembenahan parlemen diperlukan agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan mencegah dominasi kontrol oleh masyarakat sipil yang dapat memicu instabilitas sosial. (wid,ist/dya)

KASUS SUAP PONOROGO, KPK PANGGIL KADIS HINGGA KEPONAKAN SUGIRI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi dalam penyidikan tiga klaster kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kamis (4/12). Di antara para saksi tersebut ada Kepala Dinas hingga keponakan Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030 Sugiri Sukoco.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 26 saksi dugaan korupsi di Pemkab Ponorogo buntut operasi tangkap tangan (OTT) beberapa pekan lalu. Salah satu yang akan dimintai keterangan adalah Singgih Cahyo Wibowo yang merupakan keponakan Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko.

"Pemeriksaan dilakukan di Polres Madiun," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Para saksi tersebut ialah Kepala Desa Bajang Ninik Setyowati, Indah Bekti Pertiwi (swasta), Mujib Ridwan (PPK RSUD dr. Harjono S Ponorogo, Staf Bagian Umum RSUD Sekretaris Dir RSUD Wahyu Niken, Singgih Cahyo Wibowo (wiraswasta, keponakan bupati), serta Endrika Dwiki Christianto, Evitalia Puspita



Sejumlah petugas KPK membawa koper saat memasuki kantor Disbudparpora Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (29/10/2025). (Ant)

Dewi, dan Madha Agsyano habi Rummanda selaku Pegawai Bank Jatim Kantor Kas Ponorogo.

Kemudian Setya Mega Ujung (swasta), Sri Yanto (swasta), Oki Widyanto dan Imam Muslih (PNS Disbudparpora Ponorogo),

Judha (Kadis Disbudparpora Ponorogo), Diah Ayu (Kadinkes Ponorogo), Arif Pujianan (Kabid Mutasi Ponorogo), dan Daris Fuadi (swasta).

Selanjutnya Rahayu Lestari, Dyan Nurcahyanto, Eko Agus Supriadi,

Sugiri Heru Sancoko alias Heru Sancoko (swasta), Bandar (P3K Paruh Waktu Bagian Umum Setda Ponorogo, ajudan bupati), Ferry Dian Kristianto (Tenaga Kontrak Bagian Umum Sekda), Dian Vivit Pahalaningrum (istri dari Yunus Mahatma), Mela Ristiawan (Staf Pendukung Bagian Sanitarian RSUD), Retno Eri (Kabid Keuangan RSUD), dan Atul (Admin CV Cipto Makmur Jaya).

Belum diketahui materi spesifik apa yang hendak didalami penyidik terhadap para saksi tersebut. Hal itu biasanya akan disampaikan KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo setelah pemeriksaan rampung.

Sita Banyak Barang Bukti

Dalam proses penanganan perkara ini, penyidik sudah melakukan serangkaian pengeledahan dan menemukan banyak barang bukti.

Pengeledahan di antaranya dilakukan di wilayah Surabaya, yakni di rumah Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030 Sugiri Sukoco, di rumah Ely Widodo selaku adik Sukoco, serta kantor CV Raya Ilmi dan CV Rancang Persada.

"Dalam pengeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik," kata Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

"Sedangkan dalam pengeledahan di kantor PT Widya Satria, selain mengamankan dokumen dan BBE (Barang Bukti Elektronik), penyidik juga menyita senjata api yang kemudian dititipkan ke Polda Jawa Timur," sambungnya.

Budi mengatakan penyidik juga melakukan pengeledahan di wilayah Bangkalan, yakni di rumah kediaman Kokoh Prio Utomo yang merupakan Tenaga Ahli Bupati Ponorogo. Dalam pengeledahan itu juga disita sejumlah dokumen dan BBE. Sementara untuk wilayah Ponorogo, penyidik melakukan pengeledahan di sejumlah tempat.

Di antaranya di rumah Bupati Sugiri, rumah YSD yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pembangunan Monumen Reog, MJB selaku PPK pembangunan RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta rumah RLL yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, serta kantor CV Wahyu Utama.

"Dalam rangkaian pengeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik," terang Budi.

Mereka ialah Bupati Sugiri Sukoco, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2012 hingga sekarang yakni Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono yakni Yunus Mahatma, dan pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo, Sucipto. (cnbc, ist/dya)

EMPAT TERSANGKA DALAM KASUS INI, YAKNI:

- Sugiri Sancoko (SUG)**
Bupati Ponorogo
- Yunus Mahatma (YUM)**
Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo
- Agus Pramono (AGP)**
Sekretaris Daerah Ponorogo
- Sucipto (SC)**
Pihak swasta/rekanan proyek RSUD

RINCIAN TIGA KLASTER DUGAAN SUAP DAN GRATIFIKASI

- **Suap Pengurusan Jabatan**
Sugiri dan Yunus diduga menerima suap dari Sucipto, terkait pengaturan pemenang tender dan komisi proyek.
- **Suap Proyek RSUD**
Sugiri dan Yunus diduga menerima suap dari Sucipto, terkait pengaturan pemenang tender dan komisi proyek.
- **Dugaan Gratifikasi Pemkab Ponorogo**
Sugiri diduga menerima gratifikasi dari Yunus Mahatma, berkaitan dengan kewenangan YUM sebagai direktur RSUD dalam proyek dan pengadaan.

Sita Dokumen hingga Senpi

Pengeledahan di antaranya dilakukan di wilayah Surabaya, yakni di rumah Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030 Sugiri Sukoco, di rumah Ely Widodo selaku adik Sukoco, serta kantor CV Raya Ilmi dan CV Rancang Persada.

"Dalam pengeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

"Sedangkan dalam pengeledahan di kantor PT Widya Satria, selain mengamankan dokumen dan BBE (Barang Bukti Elektronik), penyidik juga menyita senjata api yang kemudian dititipkan ke Polda Jawa Timur," sambungnya.

Budi mengatakan penyidik juga melakukan pengeledahan di wilayah Bangkalan, yakni di rumah kediaman Kokoh Prio Utomo yang merupakan Tenaga Ahli Bupati Ponorogo.

Dalam pengeledahan itu juga disita sejumlah dokumen dan BBE.

Sementara untuk wilayah Ponorogo, penyidik melakukan

pengeledahan di sejumlah tempat.

Di antaranya di rumah Bupati Sugiri, rumah YSD yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pembangunan Monumen Reog, MJB selaku PPK pembangunan RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta rumah RLL yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, serta kantor CV Wahyu Utama.

"Dalam rangkaian pengeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik," terang Budi.

Seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya akan didalami penyidik untuk membantu mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi, baik dugaan suap terkait jabatan, suap proyek, maupun penerimaan lainnya atau gratifikasi.

KPK, lanjut Budi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo yang mendukung penuh kerja-kerja pemberantasan korupsi.

KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus di Ponorogo ini. (ist, ant/dya)

WNA CHINA BOS PT PMT RESMI TERSANGKA RADIASI CIKANDE

Direktur PT Peter Metal Technology (PMT), Lin Jingzhang resmi menjadi tersangka kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan paparan radioaktif Cesium-137 di fasilitas produksi perusahaan tersebut di Cikande, Banten. Meski demikian, WNA China tersebut tidak ditahan dengan alasan kooperatif dan tetap berada di Indonesia.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri menetapkan Lin Jingzhang sebagai tersangka dalam kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan paparan radioaktif Cesium-137 di fasilitas produksi perusahaan tersebut di Cikande, Banten.

Lin Jingzhang adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menjabat sebagai Direktur PT Peter Metal Technology (PMT).

"Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Dittipidter Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka yaitu bernama Lin Jin Zhang, yang merupakan warga negara RRT yang menjabat sebagai Direktur di PT Peter Metal Technology, ya," ujar Bara Krishna Hasibuan, Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Penetapan tersangka dilakukan setelah rangkaian penyelidikan sejak Agustus 2025. Pada 26 Agustus 2025, tim gabungan penyelidikan Tipidter dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menemukan paparan radiasi sebesar 216 mikrosievert/jam pada tungku bakar luar PT PMT.

Tiga hari kemudian, pada 29 Agustus 2025, Bapeten mendeteksi paparan jauh lebih tinggi pada tungku bakar bagian dalam. Jumlahnya mencapai 700 mikrosievert/jam.

Bareskrim Polri juga sudah mengajukan pencekalan Lin Jingzhang ke Dirjen Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Terkait ini, Bara menambahkan, penyidik menemukan limbah industri berupa refraktori bekas yang diduga mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diletakkan di area gudang produksi tanpa dikelola maupun diangkut pihak ketiga.

"Limbah tersebut dibuang ke salah satu lapak ronggok di kawasan industri Cikande. Pemeriksaan dan penyelidikan menemukan diduga hasil urukan di salah satu lapak ronggok yang berasal dari limbah produksi PT PMT itu," ujar Bara.

Dalam proses penyidikan, polisi memeriksa 40 saksi, termasuk



manajemen PT PMT, pemasok bahan baku, pemilik dan pengambil limbah untuk urukan lapak, pihak kawasan industri, Bapeten, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Lin dijerat dengan Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 3 Pasal 22 angka 20 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan/atau Pasal 104 Jo Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ucap Bara.

Sementara itu, Kasubdit II Direktorat Tipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Sardo Sibarani menjelaskan status tersangka saat ini tidak ditahan.

"Tidak kita tahan karena beliau kan kita sudah lihat kooperatif. Mau datang dan stay tetap masih di Indonesia," ujar dia.

Dia menambahkan, "Untuk perkara ini, ancaman hukumannya antara 3 sampai 10 tahun dengan denda sebesar 8 miliar," katanya.

Temuan sementara, kata Bara, menunjukkan pencemaran Cesium-137 di fasilitas PT PMT berasal dari barang rongsok dalam negeri.

"Yaitu melalui pembelian barang bekas ronggok di mana, dalam rongsokan tersebut tercampur peralatan bekas penggunaan industri di dalam negeri yang mengandung Cesium-137," jelas Bara. (wid,rls/dya)

DEPUTI Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Badan Pengawas Teknologi Nuklir (Bapeten) Haendra Subekti mengungkapkan, satu lokasi rumah warga memiliki tingkat kontaminasi zat radioaktif lebih tinggi dari lokasi lainnya di Cikande, Serang, Banten.

Ditemui di Kantor Bapeten, Jakarta, Kamis (4/12/2026), Haendra mengungkapkan pihak Bapeten membuka opsi untuk merubuhkan rumah tersebut untuk kemudian ditimbun dengan semen dan tanah, serta merelokasi warga yang tinggal di lokasi tersebut.

"Salah satu opsi adalah memang merelokasi penduduknya secara permanen, sehingga rumah itu bisa dirobohkan," katanya.

Meski demikian Haendra menyebut hingga kini belum ada rekomendasi terkait perobohan rumah dan relokasi pemilik rumah tersebut. Hingga kini garis batas aman juga masih menyegel rumah tersebut.

Ia menyebutkan kajian terkait bagaimana upaya dekontaminasi rumah tersebut masih terus dilakukan demi menemukan titik terang.

Haendra memaparkan upaya dekontaminasi zat radioaktif bisa dilakukan melalui berbagai cara, baik

Radiasi Tinggi di Satu Rumah Warga, Opsi Bapeten: Dirobohkan dan Ditimbun

penimbunan dengan tanah maupun penimbunan dengan tanah yang sebelumnya ditutup semen untuk mengurangi sifat radioaktif.

"Kalau memang bisa disemen lagi, istilahnya lantainya ditambah beton begitu, kira-kira mengurangi (tingkat kontaminasi) apa enggak. Opsi-opsi itu yang sedang kita siapkan," tutur Haendra Subekti.

1.136 Ton Material Tercemar

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, melaporkan terdapat 1.136 ton material terkontaminasi radiasi Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang. Hanif mengatakan, sejumlah material tersebut masih berada di tempat penyimpanan atau storage darurat di PT Peter Metal Technology (PMT).

"Sampai hari ini, material yang terkontaminasi yang tersimpan di storage PT PMT sejumlah 1.136 ton.



Memang kondisinya memang sangat darurat sehingga ke depan diperlukan perencanaan detail oleh Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) maupun BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) di dalam rangka melakukan penanganan material yang terkontaminasi, yang hari ini kita tempatkan di gudang PMT atas dasar bahwa material ini berasal dari PT PMT," ungkap Hanif dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/12/2025). (gus,ant,ist/dya)

Pemkot Malang Siapkan e-Retribusi Pasar untuk Genjot PAD

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah mempersiapkan penerapan e-retribusi pasar sebagai bagian dari program digitalisasi. Upaya ini dilakukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal akibat pendataan manual dan ketidaktepatan penarikan retribusi.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan seluruh pasar di wilayah Kota Malang akan masuk dalam program digitalisasi secara bertahap.

"Semua pasar akan didigitalisasi. Termasuk juga penerapan e-retribusi, tetapi ini bertahap. Artinya kami terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor retribusi pasar," ujar Eko, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, digitalisasi dibutuhkan untuk menyediakan data retribusi yang akurat dan terintegrasi. Dengan data yang tertata rapi, pemerintah dapat memastikan setiap pedagang membayar sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang

berlaku.

Pasalnya selama ini, Eko menyebut masih ditemukan pedagang yang masih ditemukan pedagang yang membayar retribusi jauh di bawah tarif seharusnya. Ia mencontohkan, adanya pedagang dengan kios berukuran 10 meter atau lebih yang hanya membayar Rp3.000-Rp4.000.

Padahal, sesuai Perda, pedagang dengan luasan tersebut wajib membayar retribusi sebesar Rp10.000 per hari. "Ini karena pendataan masih manual sehingga potensi seperti ini cukup besar," jelasnya.

Dalam skema digitalisasi pasar, setiap objek retribusi akan tercatat lengkap, mulai nama pedagang, alamat, hingga luasan kios. Sistem kemudian menghitung otomatis besaran retribusi berdasarkan Perda sehingga petugas tidak lagi menetapkan tarif secara manual. Langkah ini diyakininya mampu meminimalkan kebocoran dan meningkatkan PAD.

Diskopindag juga akan mengintensifkan sosialisasi Perda kepada pedagang. Eko mengakui, tantangan terbesar bukan pada

teknologi melainkan perubahan perilaku dalam proses penarikan retribusi.

Ditegaskannya, digitalisasi pasar juga bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Program tersebut telah dibahas bersama Komisi B DPRD Kota Malang sebagai langkah mempercepat modernisasi pengelolaan pasar rakyat.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan proses digitalisasi akan mulai berjalan pada awal tahun 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ditargetkan menyelesaikan pembangunan aplikasi digitalisasi manajemen pasar rakyat pada tahap pertama, yakni periode Februari hingga April 2026.



Ilustrasi: Pasar Bunulrejo, Kota Malang. (Santi/Lentera)

Aplikasi tersebut akan berisi data lengkap mulai jumlah pedagang, jumlah bedak dan los, luasan kios, hingga jenis usaha. Setelah pembangunan sistem selesai, menurut Bayu, Diskopindag akan melakukan pemutakhiran dan verifikasi data sebagai dasar penerapan e-retribusi. (Santi/Dya)

Sinergi Malang Raya Disepakati, Batu Optimistis Kunjungan Wisatawan 2026 Melonjak



Sekretaris Daerah Kota Batu, Zadiem Efisiensi. (Santi/Lentera)

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menargetkan belasan juta kunjungan wisatawan pada tahun 2026. Optimisme ini disokong oleh sinergi pariwisata Malang Raya yang baru saja disepakati bersama Kota dan Kabupaten Malang untuk memperkuat konektivitas destinasi di kawasan tersebut.

Melalui kolaborasi lintas daerah ini, ketiga wilayah menargetkan peningkatan jumlah wisatawan di Malang Raya, sehingga dampak ekonominya lebih signifikan bagi pelaku usaha wisata.

"Kami mewakili Pimpinan Daerah di Malang Raya sudah menandatangani kesepakatan bersama terkait beberapa hal, salah satunya kepariwisataan. Diharapkan kalau kita sudah sinergi, kunjungan wisata di Malang Raya ini enggak hanya sehari, ya, tapi bisa berhari-hari," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Zadiem Efisiensi, Kamis (4/12/2025).

Dijelaskannya, dengan pola perjalanan wisata yang terhubung, wisatawan dapat memulai dari Kota Malang, melanjutkan ke Kota Batu, lalu berakhir di Kabupaten Malang, atau sebaliknya. Durasi kunjungan

yang lebih panjang ini diharapkan berdampak pada percepatan ekonomi di seluruh kawasan.

Sejalan dengan penguatan pariwisata regional tersebut, Pemkot Batu juga menargetkan peningkatan jumlah wisatawan setiap tahun. Pada 2024 target ditetapkan 10 juta wisatawan, naik menjadi 11 juta pada 2025. "Intinya target naik terus. Naik terus dari tahun sebelumnya," tegasnya.

Selain menaikkan jumlah kunjungan, kerja sama Malang Raya juga menitikberatkan pada optimalisasi destinasi wisata yang selama ini kurang terawat atau minim kunjungan. Zadiem menyampaikan, ketiga daerah akan saling bertukar informasi, melakukan pembinaan, serta pengawasan secara terpadu untuk meningkatkan daya tarik destinasi.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menegaskan Malang Raya memiliki karakter wisata yang saling melengkapi. "Kabupaten Malang

punya pantai dan wisata alam. Kota Batu punya wisata pegunungan dan wisata buatanya," ujarnya.

Erik menambahkan, Kota Malang berperan sebagai penguat sektor pariwisata melalui keberadaan pusat perbelanjaan, kuliner, hingga fasilitas hotel yang mendukung kenyamanan wisatawan. Menurutnya, pengelolaan pariwisata yang lebih terpadu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Malang Raya menjadi lebih cepat.

Sekda Kabupaten Malang, Budiar, juga menyampaikan dukungannya. Ia menekankan, Kabupaten Malang memiliki sejumlah keunggulan, termasuk Bandara Abd Saleh di Kecamatan Pakis yang menjadi pintu masuk utama wisatawan ke kawasan Malang Raya.

Di sisi lain, Kota Malang dan Kota Batu memiliki kekuatan pada wisata buatan serta rekreasi keluarga. "Nah, jika itu disinergikan, bisa menjadi sebuah paket wisata," ujar Budiar. (Santi/Dya)

CHINA UMUMKAN AKAN GELONTORKAN RP 1,6 T UNTUK PALESTINA

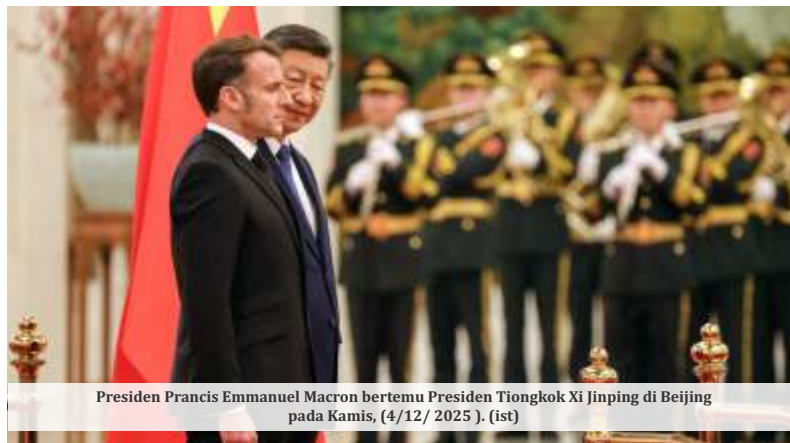
Presiden China Xi Jinping mengumumkan bahwa pemerintahnya akan memberikan bantuan sebesar US\$100 juta (sekitar Rp 1,6 triliun) kepada Palestina. Dana itu dikatakannya untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung upaya pembangunan kembali. Sebelumnya, China memilih abstain dalam resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Gaza. Menurut China, resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) itu tidak jelas dalam perumusan situasi pasca-konflik di Palestina. Resolusi juga dikiritik karena tidak menjamin pemerintahan "Palestina oleh Palestina" dan implementasi solusi dua-negara.

Hal tersebut disampaikan Xi saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan mereka di Beijing, ibu kota China pada Kamis (4/12/2025), dilansir kantor berita AFP.

Xi pun menyerukan pembangunan kepercayaan politik yang lebih besar dengan Prancis, dengan menunjukkan dukungan satu sama lain sekaligus menunjukkan "kemandirian" masing-masing pihak.

"Apa pun perubahan lingkungan eksternal, kedua belah pihak sebagai kekuatan besar harus selalu menunjukkan kemandirian dan visi strategis, menunjukkan saling pengertian dan saling mendukung dalam hal-hal inti dan isu-isu penting yang krusial," ujarnya.

"China dan Prancis harus menunjukkan rasa tanggung jawab



Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pada Kamis, (4/12/2025). (ist)

mereka, mengibarkan panji multilateralisme... dan berdiri teguh di sisi sejarah yang benar," imbuh pemimpin China tersebut.

Macron bertemu dengan Xi pada Kamis pagi waktu setempat sebagai

bagian dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari yang berfokus pada perdagangan dan diplomasi.

Pemimpin Prancis tersebut berupaya melibatkan Beijing dalam menekan Rusia untuk melakukan

gencatan senjata dengan Ukraina, setelah serangkaian diplomasi baru-baru ini terkait rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

Diketahui November lalu, resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Gaza disahkan usai disetujui oleh 13 negara anggota. China dan Rusia abstain dalam resolusi tersebut.

Resolusi itu memuat sejumlah poin mengenai pembentukan dewan pemerintahan transisi serta Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.

Dalam resolusi, juga dimuat ketentuan tentang koordinasi bantuan kemanusiaan, keamanan, serta rekonstruksi di Gaza yang porak-poranda akibat genosida Israel.

Kata Mendagri Palestina

Palestina memiliki hak berdaulat penuh atas wilayah Jalur Gaza dan karenanya, semua upaya internasional mewujudkan stabilitas di wilayah tersebut harus sesuai dengan kehendak dan visi Negara Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Palestina Ziad Hab Al-Reeh pada Rabu (3/12/2025) dalam pertemuan bersama delegasi badan Mekanisme Respons Stabilisasi (SRM) yang tengah melakukan misi penjajakan ke Palestina untuk meneliti potensi mewujudkan stabilitas di Jalur Gaza.

Palestina memandang Jalur Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem politik dan negara Palestina, kata Hab Al-Reeh.

SRM melakukan misinya melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Jerman, Kantor Perwakilan Norwegia, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Dalam kesempatan itu, Hab Al-Reeh menyampaikan bahwa pemerintah Palestina telah menyusun peta jalan yang jelas dalam aspek kehidupan sipil maupun keamanan untuk mewujudkan rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan dasar, dan penguatan institusi sipil di Jalur Gaza.

Telah disiapkan pula rencana pembinaan sistem keamanan profesional yang berdasarkan supremasi hukum, penghormatan atas hak masyarakat, dan jaminan terhadap keamanan umum, kata dia.

Mendagri Palestina itu menegaskan kesiapan pihaknya bekerja sama secara penuh dengan aktor internasional demi mewujudkan stabilitas, yang dapat memperkuat kapasitas institusi Palestina melaksanakan kewajibannya di Jalur Gaza, begitu kondisi yang tepat tercapai.

Dalam pertemuan tersebut, anggota delegasi mengkaji tujuan umum dari misi penjajakan, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803, yang bertujuan menilai faktor politik, keamanan, dan institusional yang berpengaruh pada terciptanya kondisi untuk mendukung perdamaian, pemulihan, dan pemerintahan yang berkelanjutan. (wafa,ist,rls/dya)

Israel Bom Tenda Pengungsian: 5 Terbakar Hidup-hidup



(Ilustrasi) Israel telah berulang kali melancarkan serangan sejak masa gencatan senjata, dengan justifikasi bahwa ancaman berasal dari pihak Palestina. (dok)

LIMA warga Palestina tewas, dua diantaranya adalah anak-anak dalam serangan Israel terbaru di Jalur Gaza selatan pada Rabu (3/12/2025) malam. Lagi-lagi sebuah pelanggaran baru terhadap gencatan senjata yang diteken pada 10 Oktober lalu.

Anadolu melaporkan dua anak termasuk di antara korban dalam serangan yang menargetkan tenda-

ceritakan kembali pemandangan kekacauan. Digambarkan bahwa tenda-tenda terbakar menjadi abu, mayat-mayat berserakan di tanah, dan keluarga-keluarga diselamatkan dari reruntuhan setelah serangan drone dan rudal.

Eskalasi terbaru terjadi setelah pasukan Israel melaporkan lima

tenda pengungsian warga sipil Palestina yang terlantar di sebuah kamp pengungsi di daerah Al-Mawasi, Khan Younis, kata sumber medis.

Beberapa tenda terbakar setelah serangan tersebut, membuat para korban tewas dan luka terbakar hidup-hidup.

Warga Palestina men-

tentara terluka dalam baku tembak dengan pejuang Palestina yang diduga muncul dari terowongan di Rafah timur.

Netanyahu bersumpah untuk membalas kejadian ini. Beberapa jam kemudian serangan Israel menghantam Khan Younis dan Rafah, menewaskan sedikitnya lima warga Palestina, termasuk dua anak-anak.

Para pejabat Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan seorang pejabat senior Hamas.

Menurut laporan media Israel, terdapat sekitar 200 pejuang Hamas yang terjebak di dalam terowongan bawah tanah di Rafah.

Tel Aviv belum menanggapi tuntutan Hamas dan mediator Amerika Serikat, Mesir dan Qatar untuk mengizinkan mereka melakukan perjalanan yang aman ke wilayah yang dikuasai kelompok tersebut.

Hamas mengutuk serangan tersebut, menyebutnya sebagai "kejahatan perang yang nyata" dan "upaya nyata untuk menghindari kewajiban Israel". Hamas menegaskan bahwa pihaknya tetap mematuhi gencatan senjata dan tidak berkomunikasi dengan para pejuang yang terjebak di Rafah. (rtr,ist/dya)



POLA ASUH YANG TEPAT UNTUK ANAK TIPE ORCHID DAN DANDELION

Setiap anak hadir dengan karakter dan cara berkembang yang berbeda-beda. Ada yang tampak tangguh menghadapi tantangan, ada pula yang membutuhkan perhatian dan kondisi tertentu agar bisa tumbuh secara optimal. Para ahli perkembangan mengenalkan istilah orchid dan dandelion, dua metafora yang menggambarkan tingkat sensitivitas anak terhadap lingkungan mereka.

Perbedaan itu bukan soal lebih atau kurang, melainkan bagian dari kepribadian serta cara anak merespons lingkungan.

Seperti dikutip dari myfeellinks.com, istilah tersebut terinspirasi dari sifat kedua bunga. Anak bertipe orchid diibaratkan seperti anggrek, indah, tetapi memerlukan kondisi yang pas untuk berkembang.

Sementara itu, anak dandelion mirip bunga dandelion yang bisa tumbuh hampir di mana saja, bahkan dalam kondisi yang kurang ideal. Perbandingan ini memudahkan orangtua memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dukungan yang berbeda untuk mencapai potensi terbaiknya.

Memahami tipe anak, apakah lebih dekat dengan karakter orchid atau dandelion, membantu orangtua dan pendidik menentukan pola asuh yang tepat.

Anak yang sensitif membutuhkan lingkungan yang menenangkan dan penuh kehangatan, sementara anak yang lebih tangguh tetap memerlukan bimbingan dan kasih sayang agar berkembang secara seimbang. Pada akhirnya, pengenalan terhadap dua tipe ini dapat menciptakan kondisi tumbuh kembang yang harmonis bagi setiap anak.

Anak Orchid

Anak bertipe orchid biasanya digambarkan seperti anggrek yang memerlukan perhatian khusus. Mereka lebih peka secara emosional dan sosial, mudah menangkap perubahan suasana, dan sering

memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri. Meskipun terlihat rapuh, kepekaan mereka justru bisa menjadi kekuatan, karena membuat mereka mampu merespons lingkungan dengan lebih dalam.

Jika dibesarkan di lingkungan yang penuh kasih sayang, stabil, dan suportif, anak orchid dapat tumbuh menjadi sosok yang percaya diri, kreatif, dan sangat empatik. Namun, tanpa dukungan yang tepat, mereka lebih mudah mengalami stres atau kesulitan menghadapi tekanan.

Karena itu, orangtua perlu memberi rasa aman, mengakui perasaan mereka, serta membantu mereka mengekspresikan diri dengan cara yang sehat. Dengan pendampingan yang sesuai, anak orchid bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berdaya.

Anak Dandelion

Anak bertipe dandelion diibaratkan seperti bunga liar yang dapat tumbuh dalam kondisi apa pun. Mereka cenderung tangguh, cepat beradaptasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan.

Anak dandelion biasanya lebih santai, cepat pulih dari kekecewaan, dan mudah menyesuaikan diri di lingkungan sosial. Meski tampak mandiri, mereka tetap memerlukan perhatian dan dukungan agar potensinya berkembang sepenuhnya.

Peran Lingkungan

Lingkungan memegang peran besar dalam perkembangan dua tipe anak ini. Anak orchid sangat bergantung pada kondisi sekitar—mereka berkembang optimal

ketika berada di lingkungan yang aman dan hangat. Di sisi lain, anak dandelion lebih fleksibel, tetapi tetap membutuhkan suasana yang mendukung agar tumbuh secara maksimal.

Orangtua, pengasuh, dan pendidik berperan penting dalam membangun ruang yang membantu anak merasa aman, percaya diri, serta mampu beradaptasi. Dengan memahami perbedaan kebutuhan ini, orangtua dapat menyesuaikan pendekatan pengasuhan sehingga anak bertumbuh sesuai karakter uniknya.

"Dalam memahami keunikan anak, perlu diketahui bahwa tingkat sensitivitas adalah sifat bawaan. Orang tua dapat fokus mengamati dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak dalam kehidupan sehari-hari," ungkap psikolog Joseph Laino, PsyD.

Oleh sebab itu, penting membekali anak dengan keterampilan untuk mengelola emosi.

Termasuk di antaranya memperhatikan bagaimana anak bereaksi terhadap lingkungan bising atau ramai, menangani konflik dengan anak lain, atau mengelola perasaan saat gagal dalam sesuatu.

Jika anak menunjukkan emosi besar dalam situasi tertentu, carilah cara produktif untuk membantu mereka melewati perasaan itu. Dengarkan dengan penuh perhatian, ajak mereka menamai apa yang mereka rasakan, lalu bantu menemukan respons yang lebih tenang dan sehat. Pastikan anak selalu merasa didengar dan divalidasi, sehingga mereka tahu bahwa emosi mereka penting dan aman untuk diungkapkan. (myf,ist/dya)

Ciri-ciri Anak Tipe Orchid

- 1. Tidak suka dengan perubahan**
Anak tipe orchid cenderung lebih sensitif, termasuk dengan menunjukkan reaksi emosional yang lebih besar dan cemas saat ada perubahan di sekitarnya.
- 2. Mudah terstimulasi berlebihan**
Menurut Whitehouse, anak tipe orchid juga lebih sensitif terhadap rangsangan seperti suara keras, cahaya, tekstur, dan bahkan makanan.
- 3. Mungkin hanya mau makan makanan tertentu**
Akibatnya, anak tipe orchid mungkin menolak makanan baru dan hanya mau makan beberapa jenis makanan saja.
- 4. Memiliki lingkaran pertemanan kecil**
Anak tipe orchid cenderung kesulitan berteman baru, sehingga lebih memilih untuk bersosialisasi dengan teman yang sudah lama dikenal.

Ciri-ciri Anak Tipe Dandelion

- 1. Punya mental lebih kuat**
Anak dandelion biasanya bermental kuat dan mampu menghadapi konflik dalam kehidupan pribadi maupun masalah menantang lainnya dengan lebih mudah.
- 2. Ekstrovert**
Meskipun tidak semua anak dandelion bersifat ekstrovert, tapi umumnya mereka nyaman di berbagai lingkungan dan tidak kesulitan berbicara dengan orang lain.
- 3. Memiliki motivasi tinggi**
Kemampuan menghadapi kesulitan secara langsung membuat mereka lebih terdorong untuk sukses dan bangkit dari masalah.
- 4. Berfokus pada diri sendiri**
Berbeda dengan anak orchid yang lebih sensitif terhadap emosi orang lain, anak dandelion cenderung lebih fokus pada tujuan dan kesejahteraan diri sendiri.

STUDI ILMIAH: POHON TERBUKTI CEGAH BANJIR DAN TANAH LONGSOR

Banjir besar di Sumatra jelang akhir 2025 bukan sekadar bencana alam, melainkan juga bencana iklim. Cuaca ekstrem memang terjadi karena perubahan dari iklim Bumi yang semakin panas. Namun selain itu, banjir ini juga diperparah akibat perusakan hutan secara terus menerus. Salah satu jalan keluar berbasis alam (nature-based solution) adalah mempertahankan dan menanam kembali pohon,



Banjir dan tanah longsor masih menjadi bencana tahunan yang merugikan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 2025 hingga November ini sudah terjadi lebih dari 1.800 kejadian banjir dan 720 kejadian tanah longsor.

Salah satu solusi berbasis alam (nature-based solution) yang paling banyak direkomendasikan para ilmuwan adalah mempertahankan dan menanam kembali pohon, terutama di daerah hulu sungai dan lereng bukit. Berikut ini manfaat pohon dalam mencegah banjir dan tanah longsor, didukung data dan penelitian ilmiah terbaru dari jurnal-jurnal kredibel.

Mengurangi Volume dan Kecepatan Aliran Air Hujan (Runoff)

Akar pohon bertindak seperti spons raksasa. Satu pohon dewasa dapat menyerap hingga 200-400 liter

air hujan per hari, tergantung spesies dan ukurannya. Studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Sustainability (2023) menunjukkan bahwa hutan primer di Jawa dapat mengurangi limpasan permukaan (surface runoff) hingga 60-80% dibandingkan lahan terbuka atau perkebunan monokultur.

Penelitian lain oleh IPB University (2024) di Citarum Hulu menemukan bahwa setiap 1% peningkatan tutupan pohon dapat menurunkan debit puncak banjir hingga 3-5%. Selain itu, penelitian di Hydrology and Earth System Sciences (2022) mengonfirmasi bahwa pohon dapat menyerap hingga 10 inci air per jam, jauh lebih tinggi daripada lahan rumput.

Meningkatkan Infiltrasi Air ke Tanah

Akar pohon menciptakan pori-pori besar di dalam tanah (macropore) yang memudahkan air hujan meresap ke dalam tanah ketimbang mengalir di permukaan. Penelitian di jurnal

Hydrology and Earth System Sciences (2022) menyebutkan bahwa tanah di bawah tegakan hutan memiliki laju infiltrasi 10-100 kali lebih tinggi dibandingkan tanah gundul atau padang rumput.

Infiltrasi yang baik berarti lebih banyak air tersimpan di dalam tanah sebagai cadangan air tanah dan lebih sedikit air yang menjadi banjir. Studi dari University of Plymouth (2020) di ScienceDaily juga menunjukkan bahwa penanaman pohon di daerah pegunungan dapat meningkatkan infiltrasi secara signifikan dalam 15 tahun.

Menahan Tanah dari Longsor

Sistem perakaran pohon, terutama akar tunggang dan akar lateral, berfungsi sebagai "jaring pengikat" tanah. Studi World Agroforestry (ICRAF) di Sumatera Barat (2023) yang diterbitkan di jurnal Land (2020) menunjukkan bahwa lereng dengan tutupan pohon >40% memiliki risiko longsor 70-90% lebih rendah dibandingkan lereng gundul, berdasarkan analisis 685 pohon dari 55 spesies.

Penelitian di jurnal Catena (2024) menyebutkan bahwa akar pohon jenis pionir seperti sengon dan akasia dapat meningkatkan kekuatan geser tanah (shear strength) hingga 8-15kPa, cukup untuk menahan longsor dangkal (kedalaman <3 meter) yang paling sering terjadi di Indonesia. Riset LIPI (2017) juga menekankan peran bambu dengan akar serabutnya dalam mengikat tanah dan mencegah longsor.

Mengurangi Erosi Permukaan

Serasa daun dan ranting (litter layer) di lantai hutan bertindak sebagai "bantalan" yang memecah energi butiran hujan sehingga tanah tidak langsung tergerus. Penelitian di Jawa Tengah oleh UGM (2023) menemukan bahwa lahan dengan litter tebal >5 cm mengalami erosi hanya 0,5-2 ton/ha/tahun, sedangkan lahan terbuka bisa mencapai 50-150 ton/ha/tahun. Studi serupa di Pontbren Project (Wales, tapi relevan untuk konteks tropis) menunjukkan penanaman pohon dapat meningkatkan infiltrasi hingga 70 kali lipat dalam 7 tahun, mengurangi erosi.

Mengatur Siklus Air Skala Besar

Hutan tropis melepaskan uap air melalui proses transpirasi yang kemudian membentuk awan hujan lokal. Kehilangan hutan besar-besaran justru memperparah banjir karena siklus hidrologi regional terganggu. Studi di jurnal Science Advances (2024) menunjukkan bahwa deforestasi di Kalimantan dan Sumatera telah mengurangi curah hujan lokal hingga 10-15%, yang ironisnya justru membuat musim kemarau lebih panjang dan banjir bandang saat musim hujan lebih dahsyat. (gus,ist/dya)

Spesies Pohon yang Paling Efektif di Indonesia berdasarkan riset ICRAF dan LIPI

- **Jati (*Tectona grandis*)**
akar tunggang dalam, serap air tinggi
- **Mahoni (*Swietenia macrophylla*)**
akar lateral kuat, cocok di lereng
- **Pinus merkusi**
di dataran tinggi, tahan kekeringan sekaligus banjir
- **Bambu (berbagai jenis)**
akar serabut sangat rapat, sangat efektif cegah longsor dangkal
- **Durian, rambutan, duku**
pohon buah yang juga punya akar kuat dan nilai ekonomi
- **Vetiver (*Chrysopogon zizanioides*)**
akar panjang mencegah erosi dan longsor, seperti direkomendasikan BNPB



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Warna 'Island Citrus' Diramal Jadi Wedding Color 2026

Memasuki tahun 2026, dunia pernikahan diperkirakan akan diselimuti kehangatan warna yang ceria dan penuh energi. Di antara beragam pilihan palet, sentuhan kuning muncul sebagai warna yang mencuri perhatian, menghadirkan nuansa segar, optimis, dan elegan untuk momen-momen paling berkesan dalam hidup. Dari dekorasi hingga busana, warna ini diprediksi menjadi bintang utama yang mampu menghidupkan suasana pernikahan dengan sinar cerahnya.



Minted --brand desain premium yang dikenal dengan rangkaian stationery dan dekorasinya-- bekerja sama dengan BRIDES, platform editorial pernikahan yang sudah lebih dari 90 tahun menjadi rujukan para calon pengantin, memperkenalkan Island Citrus sebagai Wedding Color of the Year 2026.

Warna ini hadir sebagai representasi dari semangat menikah di 2026 yang didominasi nuansa cerah, optimistis, dan penuh rasa syukur. Island Citrus adalah warna yang terasa seperti percampuran antara cahaya matahari dan kesegaran buah tropis--menghadirkan nuansa laid-back luxury yang kini semakin dicari pasangan modern.

Terinspirasi dari garis pantai dengan pohon palem, momen bersulang saat senja, hingga hangatnya pesta di luar ruangan, warna ini menjadi interpretasi baru untuk romansa yang klasik namun tetap terasa kontemporer.

"Di 2026, pasangan ingin warna yang tidak hanya indah, tapi juga punya energi dan makna. Island Citrus menjawab kebutuhan itu; hidup, hangat, dan sangat membawa

kebahagiaan. Bisa tampil sebagai warna utama maupun aksesoris lembut--dan kami memprediksi warna ini akan mendominasi stationery, fashion, bunga, dan masih banyak lagi," ujar Melissa Kim, Co-Founder dan CEO Minted, seperti dikutip dari Business Wire.

Island Citrus juga mencerminkan tren warna bold yang terinspirasi dari suasana destinasi tropis. Pencarian terkait warna 'yellow' di platform Minted meningkat hingga 46% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa pasangan makin menyukai palet cerah.

Secara visual, warna kuning-hijau ini berada di antara lemon dan lime yang memberikan kesan segar dan zesty pada setiap elemen pernikahan. Ketika dihadirkan dalam dekorasi meja, rangkaian bunga, koktail, hingga desain undangan, Island Citrus memberikan perpaduan antara pesona vintage, cerahnya sinar matahari, sekaligus estetika modern yang chic.

Setiap tahunnya, tim dari BRIDES dan Minted mengerucutkan satu warna yang diprediksi akan membentuk tren di tahun berikutnya. Analisa ini dilakukan melalui

pengamatan mendalam pada tren pernikahan, koleksi runway, desain interior, hingga inspirasi dari media sosial. Setelah berbulan-bulan riset dan observasi lapangan, mereka sepakat memilih Island Citrus, warna yang ceria namun tetap terkesan rapi. Nuansa ini menghadirkan perpaduan yang seimbang: playful namun tetap romantis, segar tetapi tidak berlebihan.

Warna tersebut dianggap sebagai pilihan sempurna bagi pasangan yang ingin menambahkan semburat energi baru, kesan hangat, serta atmosfer yang hidup di hari pernikahan mereka. Island Citrus bukan hanya menghadirkan visual yang memikat, tetapi juga membawa suasana yang optimistis dan penuh kebahagiaan. (tin,min,ist/dya)

5 Prediksi Tren Pernikahan Tahun Depan: Lebih Artsy

Konsep atau desain acara yang personal. Terkait konsep dan desain acara pernikahan, para pengantin lebih suka yang personal sesuai dengan jati diri mereka. Beberapa konsep yang mungkin akan menjadi tren di tahun 2026 mulai dari pernikahan kontemporer dengan nuansa metalik, tema tertentu seperti folklore, bohemian, golden age, hingga tropical wedding. Berikut beberapa tren pernikahan yang akan mendominasi tahun 2026 yang bisa jadi inspirasi kamu.

1. Konsep atau desain acara yang personal

Terkait konsep dan desain acara pernikahan, para pengantin lebih suka yang personal sesuai dengan jati diri mereka. Beberapa konsep yang mungkin akan menjadi tren di tahun 2026 mulai dari pernikahan kontemporer dengan nuansa metalik, tema tertentu seperti folklore, bohemian, golden age, hingga tropical wedding.

2. Palet warna yang lebih bold

Warna biru kobalt digadang-gadang jadi sorotan utama dalam tema warna pernikahan di tahun 2026. Warna-warna yang berani dengan nuansa yang cerah tampaknya akan menjadi pilihan, seperti coklat tua dan burgundy yang diperkirakan juga tetap populer.

3. Dekorasi hingga kue yang artsy

Terkait dekorasi, bunga masih menjadi highlight utama. Bedanya, dekorasi tahun 2026 mungkin akan lebih artsy di mana bunga-bunga tersebut dibentuk seunik mungkin. Instalasi pahatan dari bunga dan tanaman lainnya juga menjadi tren

yang semakin menyebar luas. Bunga tak hanya berjajar mengelilingi venue, tapi juga dibentuk menjadi sebuah karya seni yang memanjakan mata.

Nggak hanya dekorasinya, kue pernikahan juga semakin estetik. Millefoglie dan kue bersusun mungkin masih tetap menjadi idola, namun ada beberapa sentuhan berbeda lainnya. Misalnya, Millefoglie dengan taburan matcha, kue bernuansa pahatan seperti bentuk telur atau sesuatu yang bermakna untuk pasangan tersebut, hingga lace cake, di mana kuenya dihiasi dengan renda yang bisa dimakan.

4. Memanjakan seluruh indra

Diprediksikan bahwa tahun 2026, pesta pernikahan tak hanya sekadar makan bersama saja. Ini menjadi sebuah acara yang akan memanjakan seluruh indra, baik untuk pasangan pengantin maupun para orang-orang terkasih yang ikut merayakan. Mulai dari dekorasi yang artistik, makanan yang beragam dan unik sesuai tema, hingga kegiatan menarik seperti live painting, dinding ucapan selamat, atau mungkin DIY charm. (tin,wed,ist/dya)



Banjir Kota Malang ...dari hal 1

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta diberi waktu untuk mengusut dugaan pembalakan liar usai banyaknya gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Sumatera. "Saya kira beri kesempatan kami untuk memproses segala sesuatunya supaya tidak terlalu prematur kami sampaikan," kata Raja Juli usai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025) malam.

Raja Juli mengatakan, pihak kepolisian telah turun ke dua daerah terdampak, yakni Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara, dan Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. "Tapi bagaimana konkretnya, saya kira lebih baik nanti biar tim bekerja secara sinergis dan nanti akan kami laporkan secara reguler ke publik," jelasnya.

Kemudian, Raja Juli menambahkan, tahap pemeriksaan juga belum dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar. "Sekali lagi, belum pada tahap pemeriksaan, tapi identifikasi subyek-subyek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan," ucapnya.

Raja Juli Antoni mengindikasikan terdapat 12 perusahaan yang berkontribusi besar pada bencana banjir di Sumatra Utara.

Raja Juli mengatakan kementerianya telah menemukan indikasi kuat pembalakan hutan yang dilakukan 12 perusahaan tersebut, yang belakangan diduga ikut jadi penyulut bencana banjir di Sumatra Utara.

"Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan," kata Raja Juli saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan telah menangani sejumlah perkara pembalakan liar dengan modus pencucian kayu melalui Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di berbagai wilayah Sumatra.

Di Aceh Tengah, penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal pada Juni 2025.

Di Solok, Sumatera Barat, ditangkap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu per log, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer pada Agustus 2025.

Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, diamankan empat unit truk bermuatan kayu bulat sebanyak 44,25 m³ dengan dokumen kayu yang

bersumber dari PHAT yang telah dibekukan. Belakangan berkembang berbagai tafsir di ruang publik terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera.

"Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bakal menindak tegas pelaku penambangan yang terbukti melanggar ketentuan pertambangan yang berlaku.

Menurut Bahlil, kegiatan pertambangan adalah salah satu cara perbaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bukan mendatangkan bencana. Namun jika yang terjadi malah merusak lingkungan, maka hal tersebut harus ditindak tegas.

"Ini menyedihkan. Saya pastikan akan menindak tegas para penambang yang bekerja serampangan tidak sesuai ketentuan, jika benar musibah ini terjadi akibat kegiatan pertambangan," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Sementara, Menteri Lingkungan

Hidup (LH) Hanif Faisol mengatakan, kayu gelondongan (log) yang terbawa banjir Sumatera adalah hasil dari pembukaan kebun sawit. Hanif mengatakan, pohon yang ditebang untuk membuka kebun sawit itu tidak dibakar, melainkan dipinggirkan saja. Dia menekankan, gelondongan kayu yang dipinggirkan itulah yang terbawa banjir besar Sumatera.

"Ada indikasi pembukaan-pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log. Karena memang kan zero burning, sehingga kayu itu tidak dibakar, tapi dipinggirkan," ujar Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

"Ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu (gelondongan kayu) menjadi bencana berlipat-lipat," sambungnya

Terpisah, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, geram dengan perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar di Sumatera. Bahkan, mereka tetap beroperasi 2 hari setelah bencana terjadi.

Dalam rapat dengan Menhut Raja Juli Antoni, Titiek memutar sejumlah video. Di video itu, terlihat truk-truk pembawa kayu dengan diameter besar melintas dengan santai.

Titiek yang menerima video itu kesal melihat fenomena tersebut.

"Lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah

peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri," ujar Titiek, di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Titiek tak habis pikir pohon dengan diameter sebesar itu ditebang tanpa rasa bersalah. Padahal, pohon-pohon itu punya banyak peran penting.

"Apa salah tuh kayu? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia, mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja," ujar dia.

Sementara Greenpeace Indonesia menyebut tragedi ini sebagai bukti nyata kegagalan negara dalam menjaga lingkungan, serta menuntut pertanggungjawaban dari tiga menteri terkait.

Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, secara spesifik mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk meminta maaf kepada publik dan mundur dari jabatannya.

Ini bisa masuk kategori pembiaran. Karena itu tiga menteri ini harus meminta maaf dan mengundurkan diri," tegas Iqbal, dikutip Kamis (4/12/2025). (ist,ant,rls,gus/dya)

Banjir Kota Malang: 39 Titik Terendam dan Warga Terjebak

HUJAN deras yang mengguyur Kota Malang sejak Kamis (4/12/2025) siang memicu banjir besar yang merendam 39 titik di tiga kecamatan. Sejumlah akses jalan lumpuh sementara, puluhan rumah rusak, hingga warga, termasuk lansia dan ODGJ, harus dievakuasi.

BPBD Kota Malang menyatakan banjir kali ini terjadi akibat curah hujan ekstrem yang memicu lonjakan debit air secara cepat.

"Hujan intensitas lebat memicu peningkatan debit air hingga terjadi luapan ke jalan dan masuk ke permukiman warga. Banyak masyarakat yang terjebak di dalam rumah ketika banjir datang," ujar Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno.

Data Pusdalops BPBD menunjukkan Kecamatan Blimbing menjadi kawasan paling terdampak. Luapan air yang bercampur lumpur mengalir deras hingga menjebol tembok sejumlah rumah.

Di Jl. Karya Barat, tembok rumah warga dilaporkan roboh. Di Jl. Letjend Sutoyo, beberapa motor terseret arus. Sementara di Jl. Taman Siswa, warga terjebak di dalam rumah ketika air tiba-tiba

naik.

Di Sidomulyo II/19, seorang ODGJ juga sempat terperangkap sebelum berhasil dievakuasi.

Kerusakan paling parah terjadi di Jalan Sidomulyo, Purwodadi, ketika luapan air mencapai 165 sentimeter dan menghantam tembok rumah hingga ambrol.

"Air meluap, mungkin karena tidak kuat menahan beban luapan air akhirnya tembok pembatas jebol dan masuk ke permukiman," kata Anita Rita, Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Purwodadi.

Ia menyebut 19 rumah terdampak, lima di antaranya mengalami kerusakan berat.

"Ada kurang lebih 19 rumah yang terdampak banjir, lima di antaranya mengalami rusak parah pada bagian tembok samping terkena derasannya aliran air," ujarnya.

Warga, terutama lansia dan anak-anak, dievakuasi sementara ke rumah tetangga yang lebih tinggi.

Petugas BPBD langsung diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk evakuasi, pembersihan, dan pendataan kerugian.

"Kami sudah mengirim tim ke

lokasi. Mereka akan mengecek sekaligus dilakukan asesmen terkait penyebab dan perkiraan kerugian materi," tutur Prayitno.

Ia menyebut banjir ini menjadi alarm bagi Malang untuk memperkuat sistem drainase dan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.

Sementara, Gatot Subroto Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim memastikan banjir yang terjadi di Kota Malang pada, Kamis (4/12/2025), suda surut.

"Tapi yang pasti saat ini banjir di Kota Malang telah surut," ujar Gatot, Kamis malam.

Dalam keterangan tertulisnya, Gatot juga mengatakan banjir terjadi akibat hujan yang terjadi terlalu lama serta drainase yang tidak memadai.

"Hujan lebat dengan waktu yang lama serta drainase yang tidak memadai mengakibatkan air sungai meningkat dan meluap hingga masuk ke jalan pemukiman rumah warga. Kondisi saat ini banjir sudah 'Surut Total'," jelasnya. (santi,ist/dya)

KUOTA HAJI LANSIA DIPASTIKAN SEBANYAK 5% TIAP PROVINSI

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah menetapkan kuota khusus bagi jamaah haji lanjut usia (lansia) sebesar 5 persen di setiap provinsi pada penyelenggaraan 2026. Ia menjelaskan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kelompok lansia mendapatkan prioritas keberangkatan, dengan kategori umur yang ditetapkan mulai 65 tahun.

Kementerian Haji dan Umrah menetapkan alokasi kuota prioritas jamaah haji lanjut usia (lansia) sebesar 5 persen di setiap provinsi. Kuota ini diberikan berdasarkan urutan usia, mulai dari yang tertua hingga batas termuda kategori lansia, yakni 65 tahun.

"Jadi kuota lansia itu memang sudah diatur. Untuk masing-masing di provinsi itu 5 persen, jadi di setiap provinsi nanti 5 persennya itu harus lansia," ujar Dahnil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025)



Nantinya, jamaah haji dalam kelompok tersebut akan diurut berdasarkan usia, mulai dari yang paling tua hingga yang termuda tua.

"Kira-kira di provinsi itu yang tertua misalnya 90 tahun, maka diurut sampai 5 persen sampai umur yang

termuda tua. Yang termuda yang tua itu gimana? Yang sampai batasnya 5 persen itu, sampai umur berapa begitu. Yang lansia termuda itu disebut lansia jika 65 tahun," terang Dahnil.

Selain itu, Dahnil juga menyebut adanya porsi untuk pendamping

10 Provinsi dengan Kuota Haji 2026 dan Alokasi Lansia Terbesar

Provinsi	Kuota	Lansia (5%)
Jatim	42.409	2.120
Jateng	34.122	1.706
Jabar	29.643	1.482
Sulsel	9.670	484
Banten	9.124	456
DKI Jakarta	7.819	391
Sumut	5.913	296
Sumsel	5.895	295
Lampung	5.827	291
NTB	5.798	290

WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pemerintah memberikan keringanan waktu pelunasan biaya haji bagi calon jamaah dari 3 provinsi yang diterjang bencana banjir dan tanah longsor, yaitu Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh.

"Kita akan relaksasi di tiga daerah ini. Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, Tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa diperpanjang," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Selain itu, ia menyampaikan proses rekrutmen petugas ibadah

Pelunasan Jamaah Asal Aceh-Sumbar Diperpanjang

Haji 2026 di Provinsi Sumut, Sumbar, dan Aceh juga ditunda imbas bencana banjir bandang dan longsor.

"Jadi untuk daerah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat itu kita tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil," ujarnya.

Terkait dengan kuota lansia, Dahnil menjelaskan undang-undang telah mengatur bahwa setiap provinsi mendapatkan kuota 5 persen.

"Jadi kuota lansia itu memang sudah diatur. Untuk masing-masing di provinsi itu 5 persen. Jadi di setiap provinsi nanti 5 persennya itu harus lansia," tandas dia.

64,98% Sudah Lunasi Bipih

Sebelumnya, Menteri Agama (Mwnag) Nasaruddin Umar melaporkan perkembangan terkait pelaksanaan ibadah haji 2025. Nasaruddin menyampaikan lebih dari separuh calon jamaah haji telah

melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari total biaya sebesar Rp55.431.750.

"Progres jamaah haji reguler, pertama, kesepakatan BPIH Kemenag dan DPR pada 6 Januari 2025, BPIH 2025 disepakati Rp89.410.258,79. Bipih Rp55.431.750,78. Tentu kalau kita lihat dikurangi dengan setoran haji yang sudah masuknya, jadi jamaah haji real nya nanti akan dibayar kurang lebih Rp28 juta," ujar Nasaruddin, Selasa (2/12/2025).

Nasaruddin menyebut, sebanyak 132.119 calon jamaah atau 64,98 persen telah melunasi Bipih. Sebanyak 129.036 jamaah berhak lunas, dan 3.083 merupakan jamaah dengan kategori lansia.

"Nah ini agak sedikit cepat progressnya, terutama nanti kita akan lihat dari jamaah haji khusus itu sudah terpenuhi dalam waktu yang sangat singkat," katanya.

Kemudian, lanjut Nasaruddin, sebanyak 71.201 atau 35,02 persen belum melunasi bipih. (ist,ant,wid/dya)

lansia dengan syarat tertentu. Beberapa syaratnya antara lain, merupakan mahram atau anggota keluarga yang memiliki hubungan langsung dengan jamaah lansia, serta telah terdaftar dalam antrean haji minimal 5 tahun.

Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR mengumumkan sebaran kuota haji per provinsi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan menerapkan asas transparansi dan berkeadilan.

Adapun kuota haji per provinsi sebagai berikut: Aceh 5.426 orang, Sumatera Utara (5.913), Sumatera Barat (3.928), Riau (4.682), Jambi (3.276), Sumatera Selatan (5.895), Bengkulu (1.354), Lampung (5.827), DKI Jakarta (7.819), Jawa Barat (29.643), Jawa Tengah (34.122), D.I. Yogyakarta (3.748), Jawa Timur (42.409).

Lalu, Bali 698 orang, Nusa Tenggara Barat (5.798), Nusa Tenggara Timur (516), Kalimantan Tengah (1.559), Kalimantan Selatan (5.187), Kalimantan Timur (3.189), Kalimantan Utara (489), Sulawesi Utara (402), Sulawesi Tengah (1.753), Sulawesi Selatan (9.670), Sulawesi Tenggara (2.063), Sulawesi Barat (1.450).

Kemudian, Maluku 587 orang, Maluku Utara (785), Gorontalo (608), Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan (933), Papua Barat dan Papua Barat Daya (447), Bangka Belitung (1.077), Kepulauan Riau (1.085), Banten (9.124), dan Kalimantan Barat (1.855).

Sebelumnya, Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menegaskan bahwa prioritas bagi jamaah haji lansia merupakan amanat Undang-Undang.

"Memberikan porsi khusus kepada jamaah haji lansia adalah mandat UU, sehingga menjadi prioritas," ujarnya.

Namun, penentuan prioritas tidak hanya berdasar usia. Menurut Mustolih, calon jamaah juga harus memenuhi ketentuan minimal masa pendaftarannya, yakni lima tahun.

"Tidak semata lansia. Ada seleksinya. Apakah sudah memenuhi lima tahun masa tunggu," jelas dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Ia menambahkan bahwa aspek istithaah kesehatan juga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan jamaah lansia yang berhak berangkat. Pengalaman penyelenggaraan haji ramah lansia tahun 2023 menjadi pelajaran karena tingginya angka kelelahan dan kematian.

"Tidak bisa sembarang lansia diberangkatkan. Setelah haji 2023, karena ada dimensi risiko tinggi, kebijakan diperketat," ujarnya. (ist,ant/dya)